

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN MINAHASA, KOTA TOMOHON DAN KOTA MANADO

Vinsensius H. Mangundap¹, Anderson G. Kumenaung², Hanly F. Dj. Siwu³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : vhendra94@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan ini. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi akibat adanya distribusi pendapatan diantara berbagai rumah tangga yang tidak merata pada suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2010-2022. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak yaitu Eviews 9. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado. Produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan; Produk Domestik Regional Bruto; Pengeluaran Pemerintah; Data Panel

ABSTRACT

Income inequality is a phenomenon that often occurs in the lives of Indonesian society. North Sulawesi Province is also not free from this problem of income inequality. This problem of income inequality occurs due to the unequal distribution of income among various households in a country. This study aims to determine the effect of gross regional domestic product (GRDP) and government expenditures on income inequality in Minahasa Regency, Tomohon City and Manado City. The data used in this research is secondary data for the years 2010-2022. The analytical tool used in this research is panel data regression analysis with the help of software, namely Eviews 9. The results of this research show that gross regional domestic product and government expenditure together do not have a significant effect on income inequality in Minahasa Regency, Tomohon City, and Manado City. Gross regional domestic product has a negative and less significant effect on Income Inequality, while government expenditure has a positive and less significant effect on income inequality in Minahasa Regency, Tomohon City and Manado City.

Keywords: Income Inequality; Gross Regional Domestic Product; Government Expenditure; Panel Data

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Persoalan ketimpangan punya makna yang lebih dari sekedar deretan angka. Hal itu berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan yang bernama pembangunan.

Penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan pada berbagai daerah adalah adanya perbedaan komposisi penduduk, sumber daya yang ada, karakteristik berbagai daerah, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan antar daerah serta perbedaan kondisi demografis (Nurfifah, 2022). Kondisi demografis akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan, contohnya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan, struktur kependudukan, tingkat

pendidikan dan kesehatan, serta tingkah laku dan kebiasaan kerja yang mampu menarik aktivitas ekonomi penduduk. Newman dan Banerjee mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan ketimpangan yang tinggi (Todaro dan Smith, 2013).

Provinsi Sulawesi Utara juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan ini. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi akibat adanya distribusi pendapatan diantara berbagai rumah tangga yang tidak merata pada suatu negara (Todaro dan Smith, 2011). Ketimpangan distribusi pendapatan pada kelompok masyarakat ini diukur dan dihitung dengan menggunakan koefisien gini atau rasio gini .

Tabel 1 : Perkembangan *Gini Ratio* di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado Tahun 2010-2022

<i>Gini Ratio (0-1)</i>			
Tahun	Kabupaten Minahasa	Kota Tomohon	Kota Manado
2010	0.29	0.36	0.4
2011	0.37	0.38	0.35
2012	0.41	0.41	0.41
2013	0.39	0.41	0.4
2014	0.38	0.38	0.43
2015	0.36	0.32	0.39
2016	0.36	0.35	0.35
2017	0.35	0.38	0.39
2018	0.4	0.35	0.4
2019	0.35	0.31	0.36
2020	0.32	0.36	0.36
2021	0.387	0.354	0.346
2022	0.308	0.374	0.373

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara , 2023

Berdasarkan data, nilai ketimpangan pendapatan mengalami *trend* yang berfluktuasi. Dimana nilai tertinggi terdapat pada tahun 2014 dengan nilai koefisien gini di angka 0.43 dan yang terendah pada tahun 2010 di Kabupaten Minahasa dengan nilai 0.29. Namun jika dibandingkan antara Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado di tahun terakhir yaitu tahun 2022, Kabupaten Minahasa lebih rendah dibandingkan Kota Tomohon dan Kota Manado yaitu 0.308 di Kabupaten Minahasa berbanding dengan 0.374 di Kota Tomohon dan 0.373 di Kota Manado.

Dalam membangun ekonomi, pemerataan hasil pembangunan yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebuah tujuan utama. Namun pertumbuhan ekonomi yang cepat pada suatu negara belum pasti menjamin pembangunan ekonominya mengalami keberhasilan, justru pertumbuhan ekonomi cenderung memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan karena tidak semua pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan pemerataan (Wulandari, 2022). Pada daerah yang hasil pembangunannya tidak merata akan kekurangan lapangan pekerjaan dikarenakan investor lebih memilih daerah yang lebih merata hasil pembangunannya.

Pengeluaran pemerintah juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perekonomian. Terdapat hubungan yang erat antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Kaharudin, 2019). Kebijakan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka disparitas pendapatan antar daerah tetap akan terjadi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori Ekonomi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi pembangunan merupakan bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan juga kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010). Ekonomi Pembangunan merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi di bagi menjadi 5 tahapan yang berurutan, yang dimulai dari tahap perburuan, tahap beternak, tahap bercocoktanam, tahap perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian (Kawuwung, 2023).

Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional merupakan kriteria yang mengindikasikan mengenai penyebaran atau pembagian pendapatan atau kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu (Dumairy, 1996). Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan pendapatan relatif warga negara berpendapatan tinggi dan rendah. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah masalah disparitas pendapatan antara masyarakat daerah yang maju dengan masyarakat daerah yang tertinggal (Kuncoro, 2010).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (2023) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (1 tahun) yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara ataupun suatu daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2004). Pengeluaran pemerintah yaitu alokasi anggaran yang dikumpulkan setiap tahun dalam APBN untuk berbagai cabang atau sektor ekonomi, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Danawati, 2019).

Gini Ratio

Indeks gini, rasio gini, atau koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama *Corrado Gini* dan dipublikasikan pada tahun 1912. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks gini dalam Badan Pusat Statistik (2023) adalah suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Gurusinga, Engka dan Tolosang (2022) yang meneliti tentang analisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada pemerintahan daerah antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria yang rendah karena berada pada interval 0 – 0.5 yaitu sebesar 0.1329. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat investasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian dari Lala, Naukoko dan Siwu (2023) yang meneliti tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat ketimpangan pendapatan (Studi pada kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara). Hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian dari Sondakh, Rorong dan Sumual (2023) yang meneliti tentang analisis ketimpangan pendapatan dan kualitas pertumbuhan ekonomi empat kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan hasil penelitian di Sulawesi Utara berdasar perhitungan Indeks Williamson (IW) kota Manado termasuk kota dengan rata-rata tingkat ketimpangan berada pada level sedang dengan tingkat ketimpangan dari tahun 2011-2021 yaitu 0,37. Pada 3 kota lainnya berada dalam level rendah kota Bitung senilai 0,21, kota Tomohon senilai 0,13 dan kota Kotamobagu senilai 0,17.

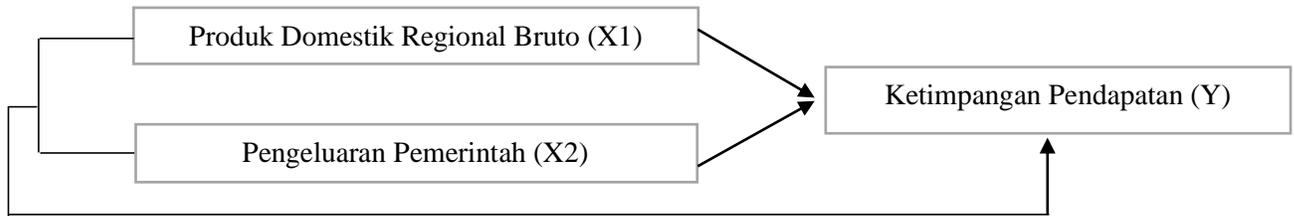
Penelitian dari Behnezhad, Razmi dan Sadati (2021) yang meneliti tentang peran kondisi kelembagaan dalam hal ini dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara dengan pendapatan per kapita menengah dan tinggi selama ini 2004-2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode panel ambang batas. Untuk mengukur kualitas kelembagaan, digunakan indeks umum tata kelola pemerintahan yang baik, yang diperoleh dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari keenam tata kelola pemerintahan indeks Bank Dunia.

Penelitian dari Kusuma, Sarfiah dan Septiani (2019) meneliti tentang analisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017. Data yang digunakan berupa data PDRB, inflasi, IPM dan indeks gini dari tahun 2011-2017. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial PDRB, inflasi, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I.Y.

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir ini, peneliti melakukan kajian pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado, baik secara parsial maupun secara simultan. Tujuan untuk mengetahui pengaruh ini adalah agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbandingan dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.

Berikut ini adalah gambaran kerangka berpikir penulis :

Gambar 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu :

1. Sesuai dengan penelitian dari Lala (2023), pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.
2. Sesuai dengan penelitian terdahulu dari Putri (2018), jika pengeluaran pemerintah minim maka bisa menghambat perekonomian dan mengakibatkan tidak meratanya pendapatan, maka disimpulkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.
3. PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang diperoleh/dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya dan yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga ataupun instansi tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu *time series* yaitu meliputi data tahunan dari periode tahun 2010-2022 dan data *cross section* Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon dengan periode waktu selama 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2013-2022. Penelitian ini dilakukan di badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto (X1)

Data yang digunakan yaitu data diukur dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang dinyatakan dalam satuan jutaan Rupiah di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.

2. Pengeluaran Pemerintah (X2)

Data yang digunakan yaitu data pengeluaran pemerintah atau konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan jutaan Rupiah di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.

3. Gini Ratio (Y)

Data ketimpangan pendapatan yang digunakan untuk variabel dependen yaitu data rasio gini di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado yang dinyatakan dalam rasio 0-1 tahun 2010-2022.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode data panel. Dalam analisis ini penulis menggunakan bantuan program *Eviews 9*. Data panel merupakan metode

penelitian yang dikumpulkan secara *cross section* (data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu) dan *time series* (data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu) (Nachrowi, 2005).

Adapun bentuk fungsional dari model regresi ini sebagai berikut :

$$GR = f(PDRB, PP)$$

Variabel-variabel dalam penelitian ini di aplikasikan dalam sebuah model sebagai berikut :

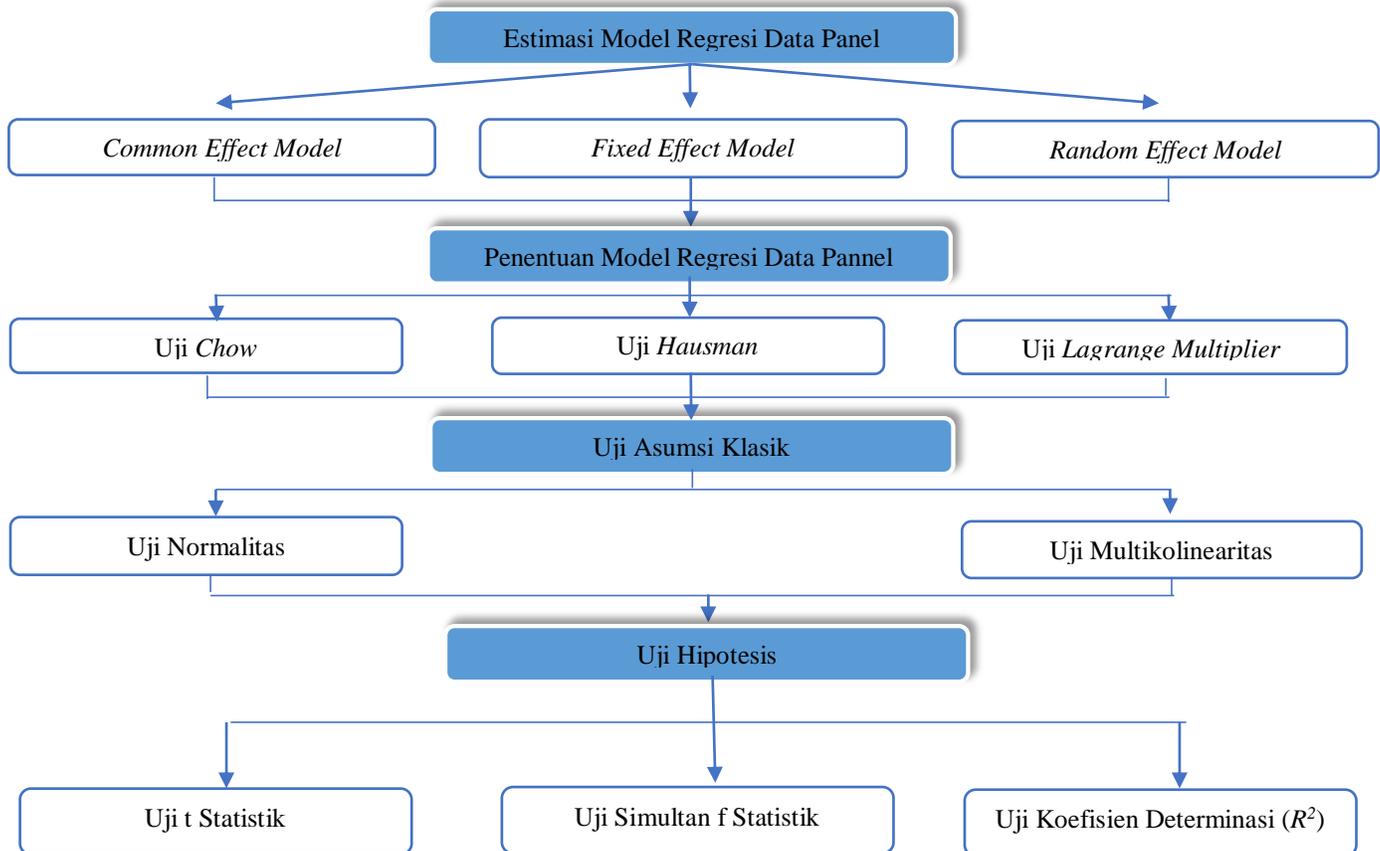
$$GR_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PP_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- GR = *Gini Ratio* (0-1)
- PDRB = *Produk Domestik Regional Bruto* (Rupiah)
- PP = *Pengeluaran Pemerintah* (Rupiah)
- α = *Konstanta*
- β_{1-2} = *Koefisien Parsial dari variabel X*
- ϵ_{it} = *Error Term* di waktu t untuk unit *cross section*
- i = 1,2 (*data cross section* 2 Kabupaten dan Kota)
- t = 1,2,3,...,13 (*data time series* 2010-2022)

Penelitian yang menggunakan regresi data panel memiliki beberapa tahapan yaitu yang pertama estimasi model regresi data panel yang di dalamnya terdapat 3 model yaitu CEM, FEM, dan REM. Setelahnya ditentukan model regresi apa yang akan digunakan dengan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Gambar 2 Tahapan Estimasi Regresi Data Panel



Sumber : Diolah Oleh Penulis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.850496	(2,34)	0.4361
Cross-section Chi-square	1.903899	2	0.3860

Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Nilai yang harus diperhatikan pada uji *Chow* adalah nilai probabilitas dari F-Statistik. Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas *cross section* $F(0.4361) > \alpha (0.05)$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Karena H_0 diterima maka dapat disimpulkan berdasarkan uji *Chow* model *common effect* adalah model yang sesuai.

Uji Hausman

Tabel 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.700991	2	0.4272

Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Keputusan penggunaan FEM dan REM dapat pula ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan dengan *Hausman*. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan *chi-square* statistik sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik. Berdasarkan tabel 4.8 uji *Hausman*, nilai probabilitas *cross section* $F(0.4272) > a 0.05$ maka H_0 diterima, maka *random effect model* yang digunakan.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 4 Uji Lagrange Multiplier

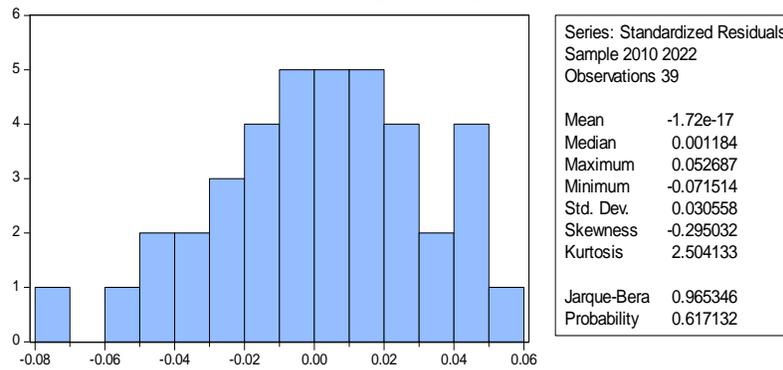
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.231739 (0.2671)	2.998135 (0.0834)	4.229874 (0.0397)

Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Uji *Lagrange Multiliper* dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *ordinary least square model* dan *random effect model*. Berdasarkan tabel diatas, nilai *Breusch – Pagan* $(0.0397) < a 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya model panel yang baik untuk digunakan adalah *random effect model*. Jadi kesimpulannya penelitian ini akan menggunakan *random effect model*.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Gambar 3 Histogram Uji Normalitas



Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Uji normalitas digunakan untuk menguji data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan histogram dan uji *Jarque-Bera*. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Berdasarkan histogram uji normalitas diatas, dapat kita ketahui bahwa nilai *probability* > 0.05 (0.617132 > 0.05), yang berarti data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

	PDRB	PP
PDRB	1.000000	0.1203807556333205
PP	0.1203807556333205	1.000000

Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah dalam model regresi data tersebut saling berkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Berdasarkan tabel di atas, dengan menggunakan uji korelasi semua variabel bebas X1 dan X2 memiliki nilai koefisien 0.1203807556333205 < 0,9 (tidak lebih dari batas nilai toleransi). Maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami multikolinearitas.

4.1.3 Uji Hipotesis

Uji t Statistik (Signifikansi Individual)

Tabel 6 Output Regresi Data Panel
Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.366964	0.009381	39.11864	0.0000
PDRB	-1.28E-09	1.26E-09	-1.020678	0.3142
PP	3.89E-09	2.83E-09	1.376398	0.1772

Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh model regresi antar variabel terikat (Ketimpangan Pendapatan) dan variabel bebas (Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah) sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar positif 0.366964 menyatakan bahwa jika variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah) pada observasi ke *i* dan periode ke *t* adalah konstanta, maka rata-rata ketimpangan pendapatan adalah 0.366964.

- 2) Koefisien regresi sebesar negatif 0.0000000128 dan nilai probabilitas $0.3142 > 0.05$ (5%) menyatakan bahwa secara parsial variabel PDRB berpengaruh negatif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan pada PDRB, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado namun dinilai kurang signifikan secara statistik.
- 3) Koefisien regresi sebesar positif 0.0000000389 dan nilai probabilitas $0.1772 > 0.05$ (5%) menyatakan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan pada pengeluaran pemerintah, maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado namun dinilai pula kurang signifikan secara statistik.

Uji Simultan f statistik

Tabel 7 Output Regresi Data Panel
Random Effect Model

R-squared	0.068764	Mean dependent var	0.368513
Adjusted R-squared	0.017029	S.D. dependent var	0.031666
S.E. of regression	0.031395	Sum squared resid	0.035484
F-statistic	1.329151	Durbin-Watson stat	1.580682
Prob(F-statistic)	0.277380		

Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas, maka hipotesisnya :

- H_0 : Produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- H_1 : Produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah 0.277380, jadi H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah) terhadap variabel terikat (Ketimpangan Pendapatan)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Output Regresi Data Panel
Random Effect Model

R-squared	0.068764	Mean dependent var	0.368513
Adjusted R-squared	0.017029	S.D. dependent var	0.031666
S.E. of regression	0.031395	Sum squared resid	0.035484
F-statistic	1.329151	Durbin-Watson stat	1.580682
Prob(F-statistic)	0.277380		

Sumber : Eviews 9 (data diolah penulis)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel terikat. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *R-squared* sebesar 0.068764 artinya secara bersama-sama variabel (X_1) produk domestik regional bruto (X_2) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap (Y) ketimpangan pendapatan sebesar 7%, sedangkan sisanya sebesar 93% (100% - 7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pemodelan ini.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado. Hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis dimana menyatakan bahwa secara parsial variabel PDRB berpengaruh negatif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan pada PDRB, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado namun dinilai kurang signifikan. Yang berarti hubungan PDRB dan ketimpangan pendapatan terbilang berujung ke arah yang positif di mana jika PDRB mengalami kenaikan, maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan. Maka dari itu diharapkan bagi pemerintah dalam penyusunan rencana pemerataan ketimpangan pendapatan adalah dengan menaikkan PDRB atau pertumbuhan ekonomi di setiap Kabupaten/Kota.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Irwanda (2022) yang meneliti tentang pengaruh PDRB, investasi dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang dimana menyatakan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan kurang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan pada pengeluaran pemerintah, maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado namun dinilai kurang signifikan. Maka dari itu diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi pengeluaran yang direncanakan, dalam hal ini pemerintah lebih mengedepankan pengeluarannya lebih menyeluruh ke setiap daerah bukan hanya mengembangkan di salah satu daerah atau dengan kata lain hanya mengembangkan satu daerah maju dan tidak memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Islamiah (2021) meneliti tentang intervensi variabel investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Di mana dalam penelitiannya pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan tapi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini juga termasuk dalam teori pengeluaran pemerintah di mana pemerintah memiliki 4 peran, yaitu: peran alokasi, peran distribusi, peran stabilitas dan peran dinamis.

5. PENUTUP

Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PDRB dan pengeluaran pemerintah dinilai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado yang diduga terjadi akibat kurangnya objek dari penelitian karena walaupun dinilai tidak signifikan, PDRB tetap berpengaruh secara negatif yang artinya jika terjadi peningkatan dalam PDRB maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan rasio gini yang berarti semakin membaik pula pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Begitu pula dengan pengeluaran pemerintah yang berpengaruh secara positif yang artinya pemerintah dinilai mengeluarkan dana tidak secara merata ke seluruh wilayah, maka dari itu, ketimpangan pendapatan harus diperhatikan dan harus ditangani secara dini

salah satunya yaitu investasi yang dilakukan pemerintah harus tepat sasaran dalam meningkatkan infrastruktur yang ada. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan lebih banyak objek penelitian dan bisa dikembangkan lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Behnezhad, S., Mohammad, S., Razmi, J., Saeed, S., & Sadati, M. (2021). The Role of Institutional Conditions in the Impact of Economic Growth on Income Inequality. *Journal of Finance*, 9(1), 11–15. <https://doi.org/10.12691/jfe-9-1-2>
- Danawati, S., Bendesa, I. K. G., Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*7, 2123–2160.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Gurusinga, E. B., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 22(7), 37–48.
- Irwanda, V. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang*.22, 3.
- Islamiah, N., Rahmatia, Paddu, H., Zamruhi, M. Y. (2021). Intervensi Variabel Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomika*. 5, 1–16.
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., Niode, A. O., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Ratulangi, U. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 19(04), 13–23.
- Kawuwung, A. S., Kumenaung, A. G., Tolosang, K. D. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Hotel Terhadap Perekonomian di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 6(23), 49–60.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar - Dasar Ekonomika Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Directory Journal of Economic*, 1(3), 282–293.
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61–72.
- Nachrowi, D. (2005). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurfifah, R., Walewangko, E. N., Masloman, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22, 25–36.

- Sondakh, C. A., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Empat Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 23(4), 1–12.
- Statistik, B. P. (2023). *No Title*. <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi* (3rd ed.). Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Todaro dan Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Jakarta. Erlangga.
- Todaro dan Smith. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga* (8th ed.). Jakarta. Erlangga.
- Wulandari, S., D. F., & Rahmawati, F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah , Pembangunan Manusia , dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (Ekuitas)*. 3(3), 583–590.